



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : NOMOR : 53/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/1/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2023;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/1393/OT.01.3/XII/2021 Tentang Penunjukan Tim Seleksi Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2022;
12. Berita Acara Tim Seleksi Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026.**

Kesatu : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026;

Kedua : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit terdiri dari :

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Tata Laksana
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Area Penguatan Pengawasan
6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Dan 2 (dua) Komponen Hasil yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Pengadilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Pencari Keadilan

- Ketiga : Nama-nama Tim Kerja susunannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dan Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Area sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk melaksanakan tugasnya, sesuai pedoman dan bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura

Nomor : 53 /KPTUN.W8-TUN3/SK.T11/1/2026

Tanggal : 05 Januari 2026

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026**

NO	Kedudukan Dalam Tim Pembangunan Zona Integritas	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Merna Cinthia, S.H.,M.H.	Ketua
2.	Ketua Tim	Yusup Klemen, SH	Wakil Ketua
TIM SEKRETARIAT			
1.	Koordinator	Fefi Yanti Thomas, S.E.	Sekretaris
2.	Anggota	M. Nabil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
3.	Anggota	Ridwan Kristiawan, S.H.	Penata Layanan Operasional
TIM KERJA			
MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA 1)			
1.	Koordinator	Jenrison Nainggolan, S.H	Hakim
		Irfan Amos Sampe, S.H	Hakim
2.	Anggota	Petrus Mitting, SH	Panitera Pengganti
3.	Anggota	Roy Erigh Pariaribo, SH	Panitera Pengganti
4.	Anggota	Elizabeth Kaikatuy, S.H.	Panitera Pengganti
5.	Anggota	Yeyen M. Frans Suli	Jurusita Pengganti
TIM KERJA			
PENATAAN TATA LAKSANA (AREA 2)			
1.	Koordinator	Fery Rochmad Ramadhan, S.H	Hakim
2.	Anggota	Indra Febrian, SH	Kasubbag Umum dan Keu
3.	Anggota	Mareta Cici Wulansari, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
4.	Anggota	Syane J. Ratag, S.E.	Penata Layanan Operasional
5.	Anggota	Izak Pattipeilohy	Operator Layanan Operasional
TIM KERJA			
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA 3)			
1.	Koordinator I	Rizal Abdurrahman, S.H.	Hakim
2.	Anggota	Fitri Yulyanti, SH	Kasub Bag Kepeg Ortala
3.	Anggota	Esti Sitinjak, S.Kom	Penata Layanan Operasional
4.	Anggota	Heni M. Klemen, S.H.	Penata Layanan Operasional
5.	Anggota	Billy Langoy	Operator Layanan Operasional
TIM KERJA			
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA 4)			
1.	Koordinator	Janathul Firdaus Tirtayasa, S.H	Hakim
2.	Anggota	Rafika, S.Pt	Kasub Bag IT dan Pelaporan
3.	Anggota	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Anggota	Renhard Marcel Silalahi, A.Md.Kom	Dokumentalis Hukum
5.	Anggota	Pondan Mangallo, SE	Penata Layanan Operasional

TIM KERJA			
PENGUATAN PENGAWASAN (AREA 5)			
1.	Koordinator	Ratna Jaya, SH., MH.	Hakim
		Addinul Haq Yaqub, S.H	Hakim
2.	Anggota	Ade Rudianto	Panitera Muda Perkara
3.	Anggota	Christina M.Y.Rohrohmana, SH	Jurusita Pengganti
4.	Anggota	Yeyen M.F. Suli, Amd. Kom	Jurusita Pengganti
5.	Anggota	Muhammad I. Al Husna, SH	Analisis Perkara Peradilan
6.	Anggota	Rudolof M.M.L.W Lekitoo, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
TIM KERJA			
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA 6)			
1.	Koordinator	Ad'jdarn Riyange Zulfachmi.S, S.H.	Hakim
2.	Anggota	Suyadi, S.H.	Panitera
3.	Anggota	David A. Mitting, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	Christina M.Y. Rohrohmana, S.H.	Jurusita Pengganti
5.	Anggota	Ronald R. Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
6.	Anggota	Muhammad I. Al Husna, SH	Analisis Perkara Peradilan
7.	Anggota	Chris Emilians Putra Jacobus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
8.	Anggota	Rahmat	Penata Layanan Operasional
TIM SURVEI			
1.	Koordinator	Prayogo Kurnia, S.H	Hakim
2.	Anggota	Suyadi, S.H.	Panitera
3.	Anggota	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
4.	Anggota	Ronald R. Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Anggota	Muhammad Nabil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
6.	Anggota	Chris Emilians Putra Jacobus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
7.	Anggota	Renhard Marcel Silalahi, A.Md.Kom	Dokumentalis Hukum
8.	Anggota	Billy Langoy	Operator Layanan Operasional
9.	Anggota	Esti Sitinjak, S.Kom	Penata Layanan Operasional
10.	Anggota	Syane J. Ratag, S.E.	Penata Layanan Operasional
11.	Anggota	Heni M. Klemen, S.H.	Penata Layanan Operasional
12.	Anggota	Ridwan Kristiawan, S.H.	Penata Layanan Operasional
13.	Anggota	Rahmat, S.H.	Penata Layanan Operasional
14.	Anggota	Izak Pattipeilohy	Operator Layanan Operasional
16.	Anggota	Pondan Mangallo, SE	Penata Layanan Operasional

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

